

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PAJAK HIBURAN
DI DIANA WATER PARK KABUPATEN BARRU**



Oleh

AL – FINA. S

Nomor Stambuk Mahasiswa : 105641110220

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PAJAK HIBURAN
DI DIANA WATER PARK KABUPATEN BARRU**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

AL – FINA. S
Nomor Stambuk Mahasiswa : 105641110220

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Strategi Pemerintah Dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak
Hiburan Di Diana *Water Park* Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Al – Fina. S
Nomor Induk Mahasiswa : 105641110220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

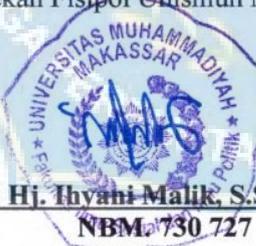

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

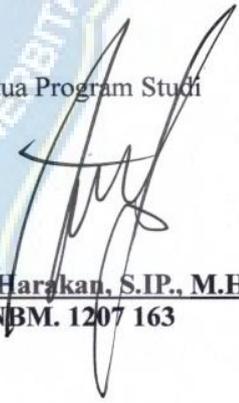

Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 730 727

NBM. 1207 163

PENERIMAAN TIM

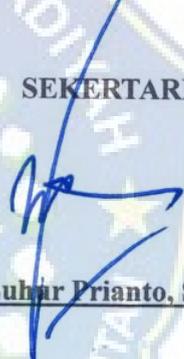
Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor.0240/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 27 Februari tahun 2024.

TIM PENILAI

KETUA

SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si ()
4. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Al – Fina. S
Nomor Induk Mahasiswa : 105641110220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Februari 2024

Yang Menyatakan,

Al – Fina. S

ABSTRAK

Al – Fina. S, Nuryanti Mustari, Nurbiah Tahir. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hiburan Di Diana Water Park Kabupaten Barru.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan suatu tantangan yang kompleks dan memerlukan strategi yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan fokus pada indikator strategi organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penulisan kualitatif dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak hiburan di Diana Water Park Kabupaten Barru ada yang tergolong optimal dan belum optimal apabila dibahas dari aspek sosialisasi sudah berjalan seperti teori yang ada namun belum optimal karena masih terdapat hambatan dari berbagai aspek. *Strenght*, dari segi yang telah dijalankan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari segi *weakness*, Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan program. Selanjutnya dari segi *opportunity*, strategi tersebut tidak hanya dijalankan oleh satu elemen saja tapi pastinya melibatkan yang lain seperti swasta dan pemerintah. Yang terakhir *Threat*, perubahan teknologi yang menjadi tantang pemerintah untuk menyesuaikan situasi yang terjadi.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, PAD, Pajak Hiburan

KATA PENGANTAR



“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hiburan Di Diana Water Park Kabupaten Barru”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Banyak rintangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan dan memotivasi penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran dan menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada Ibu I Jume, seseorang yang biasa saya sebut mama. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi ini. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya, semoga mama sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Mama harus selalu ada disetiap perjalanan hidup

saya. *I Love You More*

2. Kepada lelaki kuat yang bercita-cita menyekolahkan putrinya sampai sarjana, ayahku. Almarhum Syainuddin namanya. Beliau yang telah menjadi panutan bagi saya agar tidak berputus asa menjalani hidup. Segala impianmu telah saya wujudkan satu persatu. Seluruh kebaikanmu saat masih hidup memberi kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.H.I selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I yang menjadi motivator hebat di kampus serta selalu mengarahkan saya dengan segala rasa ikhlasnya dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing II saya yang selalu sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, material dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang menjadi satu perjuangan di ortom Muhammadiyah dari awal kuliah sampai sekarang.

10. Sahabat saya di HIFEMI yang telah setia memberikan tenaga, waktu, material maupun moril dan *support* dari semester 1 sampai sekarang.
11. Seluruh teman-teman IP5C yang selama ini telah mengikuti jadwal mata kuliah yang selalu memiliki cerita tersendiri di dalam kelas.
12. Kantor Bapenda dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru yang telah membantu dan memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 07 Februari 2024

Penulis,

Al – Fina. S

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori Dan Konsep	11
C. Kerangka Pikir	22
D. Fokus Penelitian	24
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	26
C. Informan.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Pengabsahan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
RIWAYAT HIDUP	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Gambar 2.2 <i>Overlay Visualization</i>	7
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Olah Data Software Nvivo 12 <i>Plus</i> 2024.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pajak Hiburan 2019-2023	5
Table 3.1 Informan Penelitian	27
Tabel 4.1 Jumlah Wisata Kabupaten Barru.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Pengunjung Diana Water Park Tahun 2021-2023	38
Tabel 4.3 Realisasi PAD Sektor Pajak Hiburan Diana <i>Water Park</i>	39
Tabel 4.4 jumlah PAD kabupaten Barru tahun 2021-1023	39
Tabel 4.5 Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman.....	51
Tabel 4.6 Matriks SWOT Strategi Pemerintah Daerah	52



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Strategi Pemerintah.....	55
Grafik 4.2 Strategi Organisasi.....	56
Grafik 4.3 Strategi Program	58
Grafik 4.4 Strategi Pendukung Sumber Daya	60
Grafik 4.5 Strategi Kelembagaan.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu komponen terpenting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk suatu daerah tertentu, yaitu untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota. pada Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, ayat 18 menyatakan bahwa PAD adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang setempat yang sesuai dengan undang-undang federal yang mengatur perdagangan antar negara bagian. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2009), PAD menandakan kemampuan pemerintah daerah untuk menilai kegiatan sehari-hari dan potensi pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah tertentu. (Multiningsih et al., 2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu metode tunggal digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek untuk memelihara warisan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah bisnis yang bertujuan meminimalkan resiko ketika menerima dana dari pemerintah di atas itu bertujuan untuk meminimalkan resiko ketika menerima dana dari pemerintah di atas (subsidi). Pasal 157 UU No. 32 tahun 2004, golongan belanja pemerintah terdiri dari: pendapatan asli daerah yang disebut juga PAD, yang meliputi: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dimilikinya telah disetujui, dana perimbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah, PAD lain-lain yang sah. (Rosmiati et al., 2018)

Menurut Candrasari dan Ngumar (2016), laju perkembangan perkotaan yang meningkat dimungkinkan menjadi faktor perkembangan dan pertumbuhan beberapa daerah. Realisasi yang sesuai rencana penerimaan pajak hiburan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kejelasan dan kepastian peraturan pajak, kesederhanaan undang-undang, persepsi masyarakat, aparat pajak yang berkompeten, disiplin, bertanggung jawab, memiliki kecapakan teknis dan bermoral tinggi serta kebijakan target dan interupsi yang dianjurkan. (Refianto & Christian et al., 2018)

Keuangan pemerintah daerah dapat diperjelas dalam hal besaran PAD yang digunakan, serta bagaimana mengalokasikan uang tersebut untuk di dalam inisiatif pengembangan masyarakat dan pengelolaan organisasi sektor publik. Ketentuan ukuran PAD yang digunakan, serta bagaimana mengalokasikan uang ini untuk mendukung inisiatif pengembangan masyarakat dan pengelolaan organisasi sektor publik. Untuk meningkat jumlah PAD, pemerintah daerah harus melakukan analisis potensi setiap daerah dan jumlah setiap dari sebagai potensi daerah. PAD yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang dimaksud, penting untuk mencapai tujuan konstruksi yang diinginkan, kebijakan penanganan dilakukan dengan menentukan penanggulan atau potensi jenis-jenis PAD yang bisa dilihat dari besarnya kontribusi dan pertumbuhan jenis PAD tersebut. pelaksanaan PAD menuntut peningkatan kondisi ekonomi lokal dan global, serta kondisi ekonomi nasional, memerlukan peningkatan kondisi ekonomi lokal dan global, serta kondisi ekonomi nasional. (Akhmadi et al., 2023)

Pemerintah daerah sering menghadapi kebutuhan anggaran yang semakin meningkat untuk mendukung berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan dapat memenuhi kebutuhan keuangan ini tanpa terlalu mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Program pendukung sumber daya dan kelembagaan adalah kegiatan yang dirancang untuk mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, program ini biasanya meliputi berbagai macam kegiatan mulai dari pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga pengelolaan sumber daya secara efisien. Salah satu program pendukung sumber daya yang penting adalah pengembangan karyawan, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan karyawan agar mereka dapat bekerja lebih efisien dan efektif.

Selain program pendukung sumber daya, organisasi juga perlu memiliki kelembagaan yang kuat. Kelembagaan adalah struktur dan proses yang diperlukan untuk mengelola organisasi dengan baik. Salah satu aspek penting dari kelembagaan adalah kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan ini harus dikelola dengan baik agar organisasi dapat beroperasi dengan lancar.

Sektor hiburan juga sering kali terkait erat dengan industri pariwisata. Berbagai atraksi hiburan, seperti festival, konser, dan acara budaya, dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Dengan mengembangkan sektor hiburan, pemerintah daerah dapat mendukung pertumbuhan industri pariwisata dan meningkatkan pendapatan dari sektor ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menganalisis berbagai komponen

pendapatan daerah, dengan pembangkit pajak hiburan, pembangkit tenaga pajak hal utama potensi yang ada, maka tingkat nasionalisme di daerah akan meningkat. Sebagai penunjang prakarsa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah diberikan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Inisiatif Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah diberikan oleh pemerintah daerah, apakah itu pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. PAD adalah komponen terpenting dari proses pembangunan kembali daerah. (Virnawati et al., 2017)

Penghasil devisa negara dan pertumbuhan ekonomi regional biasanya dikaitkan dengan pariwisata. Sebuah sektor ekonomi yang berkembang pesat disebut pariwisata. Baik daerah maupun negara bersaing untuk meningkatkan lokasi wisata. Cara terbaik untuk meningkatkan citra suatu daerah dan meningkatkan pendapatan dan devisa negara adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Jika ada destinasi atau objek wisata yang ditawarkan di suatu daerah, masyarakat akan tertarik. Banyak kategori destinasi wisata, termasuk kuliner, alam, dan budaya. (Mustari et al., 2021)

Diana Water Park ini merupakan salah satu tempat wisata favorit di Kabupaten Barru yang ramai pengunjung. *Diana Water park* terletak di kawasan perbukitan, yang tentunya menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Hampan pegunungan dan pepohonan rindang di sekitaran *Diana Water park* menambah keindahan spot destinasi wisata ini. Selain itu, pengunjung di *Diana Water park* ini juga dimanjakan dengan berbagai wahana menarik yang disediakan pengelola.

Adapun wahana yang disediakan diantaranya: Kolam renang anak dan balita, kolam renang dewasa, dan kolam renang bermain seluncuran. Selain itu juga terdapat wahana flying fox, taman bunga, spot foto pemandangan alam, ayunan, tempat karaoke dan lain sebagainya. Jadi spot-spot yang ada di Diana Waterpark ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan.

Pajak hiburan memiliki peran sesuai dengan perkembangannya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bisnis hiburan sebagai salah satu sumber pajak. Pada Tahun 2019 realisasi pajak hiburan melampaui target, tetapi pada tahun 2020-2023 Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Barru belum mencapai target yang dianggarkan, berikut adalah beberapa rincian jenis pajak yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

Table 1.1 Data pajak hiburan 2019-2023

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2019	15.000.000.00	29.000.000.00
2.	2020	15.575.000.00	11.175.000.00
3.	2021	5.000.000.00	2.205.800.00
4.	2022	42.000.000.00	2.391.357.00
5.	2023	50.400.000.00	6.823.300.00

Sumber Data : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pajak hiburan pada tahun 2019 melebihi realisasi yang ditargetkan alasan utamanya adalah destinasi wisata baru saja dibuka dan ramainya wisatawan yang berkunjung pada tahun tersebut. Pada tahun 2020-2023 mengalami penurunan penerimaan pajak hiburan hal ini dikarenakan kurangnya potensi yang dimiliki pada sektor hiburan kabupaten Barru. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hiburan Di Diana Water Park Kabupaten Barru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hiburan di Diana Water Park, Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hiburan di Diana Water Park, Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

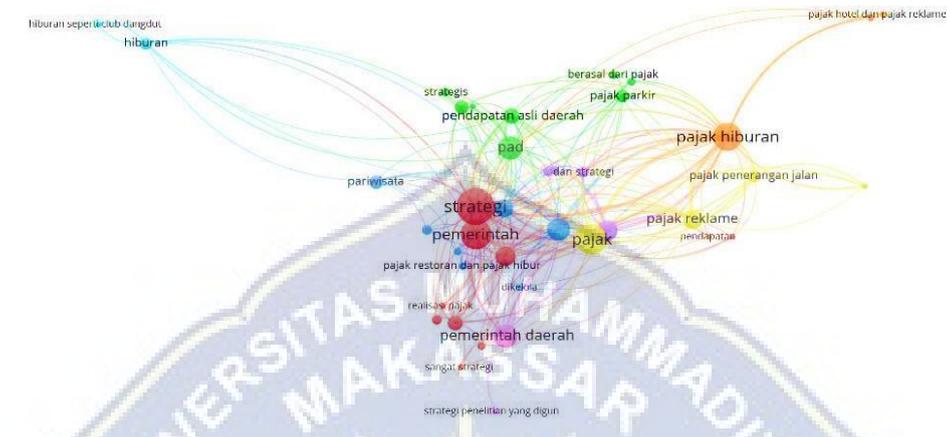
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menyediakan rekomendasi strategi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hiburan, yang dapat berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai kendala dan hambatan dalam pengelolaan pajak hiburan, sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

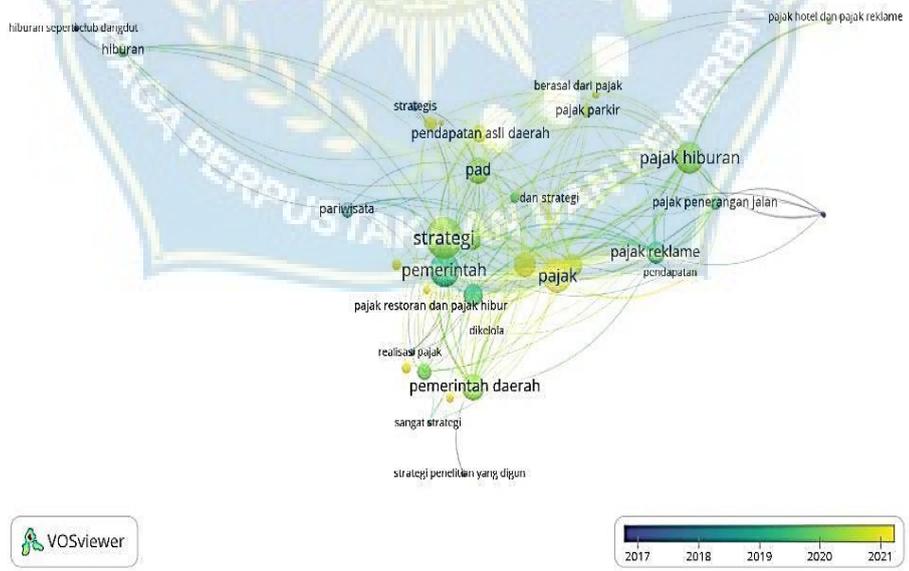
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu



Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu
Sumber Data: Diolah Oleh VOSviewer, 2023



Gambar 2.2 *Overlay Visualization*

Sumber Data: Diolah Oleh VOSviewer, 2023

Berdasarkan visualisasi vosviewer gambar 2.1 dari hasil pengelolaan data riset menggunakan kata kunci strategi pemerintah, PAD, pajak hiburan, dikelompokkan ke dalam 7 klaster pada software vosviewer :

1. Klaster 1 dengan warna merah mencakup 8 item yaitu pajak daerah, pemerintah, penerimaan pajak, realisasi pajak, retribusi daerah, sangat strategi, wajib pajak.
2. Klaster 2 dengan warna hijau mencakup 8 item yaitu asli daerah, berasal dari pajak, dan pajak, merupakan strategi, pad, pajak parkir, pendapatan asli daerah, strategi.
3. Klaster 3 dengan warna biru mencakup 5 item yaitu dikelola, hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, pariwisata, pajak hotel.
4. Klaster 4 dengan warna kuning mencakup 5 item yaitu beberapa macam pajak, pajak, pajak penerang jalan, pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel.
5. Klaster 5 dengan warna ungu mencakup 4 item yaitu strategi, pajak hiburan, pajak restoran, wisata.
6. Klaster 6 dengan warna biru muda mencakup 3 item yaitu hiburan, hiburan seperti club dangdut, kegiatan hiburan.
7. Klaster 7 dengan warna orange mencakup 3 item yaitu pajak hiburan, pajak hotel dan pajak reklame, pemerintah Menyusun.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan 803 artikel jurnal dengan rentan waktu 2013-2023 yang dimana berkaitan erat dengan kata kunci strategi pemerintah, pendapatan asli daerah dan

pajak hiburan. Artikel-artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan VOSviewer untuk menentukan posisi proyek penelitian dari peneliti.

Hasil olah data *Vosviewer* gambar di atas menjelaskan bahwa penelitian Halomoan Sihombing tentang pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap pendapatan asli daerah terutama di Kota Medan. Begitupun dengan pajak reklame yang memiliki pengaruh baik yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Mengingat bahwa kondisi kabupaten kota di Indonesia beragam maka dari itu pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan perundang undangan tentang pajak hiburan yang menjadi landasan hukum dan teknik operasional dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan disetiap kabupaten/kota di Indonesia. (Yulia et al., 2020)

Di dalam penelitian terdahulu Jamal Bake juga membahas tentang strategi peningkatan pendapatan retribusi daerah di Kota Kendari, pada tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan wawancara kepada informan. Hasil dari penelitian ini strategi intensifikasi melalui perbaikan kualitas layanan publik dan peningkatan sistem pemungutan, penggunaan teknologi, dan peningkatan pengawasan, penetapan sumber-sumber retribusi baru serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi merupakan strategi pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan PAD. (Bake et al., 2022).

Dalam visualisasi VOSviewer tidak terdapat penelitian yang membahas tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pajak hiburan, lebih lanjut belum terdapat lokasi penelitian yang sama pada penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang direncanakan yaitu lebih spesifik pada sektor pajak hiburan.

Pada penelitian terdahulu Sri Wahyuni membahas tentang Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dalam penelitian ini, riset kualitatif dipakai dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini diharapkan BAPENDA Kota Pekanbaru melakukan peninjauan rutin untuk mengumpulkan data wajib pajak terkait jumlah dan waktu panen sarang burung walet, sehingga BAPENDA Kota Pekanbaru dapat memberikan informasi kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Sangat perlu bagi pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan atau tindakan yang lebih ketat, terutama di BAPENDA Kota Pekanbaru ini terdapat wajib pajak yang melanggar kewajibannya membayar pajak dengan sengaja atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wahyuni & Yuliani et al., 2021).

Belum ditemukan penelitian yang membahas tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pajak hiburan, oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan agar kita bisa mengimplementasikan strategi pemerintah dalam peningkatan PAD pada sektor pajak hiburan.

B. Teori Dan Konsep

1. Konsep Strategi

Kata "strategi" berasal dari kata Yunani "strategos" atau "stretetus", yang memiliki kata jamak "strategi". Kata "strategos" memiliki generalship, atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal perang saat mereka membuat rencana untuk memenangkan perang (Salusu, 2006:84). Istilah ini juga dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan cara yang efektif berdasarkan sarana yang tersedia (Breckner dalam Heene dkk., 2010:53). Strategi pada dasarnya adalah alat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang telah direncanakan atau dipola. Dengan kata lain, strategi adalah rencana yang sudah terstruktur dan terintegrasi dengan tujuan utama organisasi dalam kerangka kebijakan dan langkah-langkah kegiatan yang konsisten.

Menurut Rangkuti (dalam Nainggolan dan Kampana, 2015:46), strategi adalah upaya bisnis untuk menentukan bagaimana kekuatan-kekuatan internalnya berfungsi dengan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) pasar. Menurut Siagian (2016:29), strategi adalah tujuan jangka panjang suatu organisasi, bersama dengan pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Chandler (dalam Rangkuti, 2016:4) mengatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan penting yang dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi.

Menurut Mintzberg dalam Dayansyah (2014), strategi dapat didefinisikan dalam lima cara: sebagai rencana, pola, posisi, taktik, dan perspektif.

- a. Tidak jauh berbeda dengan ide tentang perencanaan strategi, strategi

sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah terencana (tindakan yang terarah) untuk mencapai serangkaian tujuan atau ideal.

- b. Strategi sebagai pola adalah pola perilaku masa lalu yang konsisten dengan menggunakan strategi yang merupakan kesadaran dari penggunaan yang terencana atau diniatkan. Pola ini berbeda dengan maksud karena muncul begitu saja.
- c. Strategi sebagai posisi adalah penentuan posisi perusahaan atau produk dalam pasar berdasarkan kerangka konseptual konsumen atau penentu kebijakan. Faktor eksternal menentukan strategi utama.
- d. Sebuah strategi atau taktik adalah serangkaian tindakan yang dirancang khusus untuk mengelabui atau mengecoh lawan.
- e. Strategi sebagai perspektif berarti menerapkan strategi dengan menggunakan teori yang ada atau intuisi alami dari cara berpikir atau ideologi.

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis untuk membangun alternatif. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999, perencanaan strategi adalah suatu proses yang fokus pada hasil yang diharapkan dalam waktu satu hingga lima tahun. Dengan mempertimbangkan bahaya, peluang, dan kemungkinan, rencana strategi mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan, sasaran, dan program termasuk kegiatan, program, dan kebijaksanaan yang realistis dan dirancang sedemikian rupa untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan (Hadi et al., 2020).

Terdapat berbagai strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe strategi meliputi :

1) Strategi Organisasi

Strategi ini melibatkan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis baru. Pembatasan-pembatasan penting diperlukan untuk menentukan apa yang akan dilakukan dan untuk siapa.

2) Strategi Program

Strategi ini lebih memperhatikan implikasi dari suatu program tertentu. Diperhatikan juga dampak apa yang mungkin terjadi jika suatu program diluncurkan atau diperkenalkan kepada sasaran organisasi.

3) Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi ini difokuskan pada maksimalisasi sumber daya essential yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan lain-lain.

4) Strategi Kelembagaan

Fokus strategi institusional adalah meningkatkan upaya organisasi dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

2. Konsep Strategi Pemerintah

Perjuangan untuk meningkatkan pendapatan daerah menghasilkan Good Governance dan peningkatan pelayanan publik sebagai tambahan untuk mewujudkan Kabupaten Barru yang berfungsi unggul dan berdaya saing, sehingga upaya terus menerus dilakukan antara lain:

- a. Mengintensifikan sistem prosedur pungutan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pendapatan dan pelayanan daerah kepada masyarakat yang baik karena pendidikan dan latihan maupun teknik intruksi.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan semua lembaga pengelola pendapatan di daerah dan koordinasi serta kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat pengendalian pendapatan lokal (Hanifah et al., 2016).

Selama ini, lembaga pemerintah cenderung berfokus pada kinerja hanya pada input dan output, serta pencapaian realisasi fisik dan keuangan. Namun, dalam perencanaan strategi, tidak hanya mencakup hal-hal input dan output, tetapi juga hasil, keuntungan, konsekuensi, dan prosedur pelaksanaannya. Ide perencanaan strategi dimaksudkan untuk menyatukan berbagai tugas organisasi dan melakukan secara keseluruhan, gagasan ini akan membantu manajer untuk fokus pada pencapaian hasil yang diharapkan.

3. Konsep PAD

PAD adalah jenis yang mengidentifikasi kemampuan negara tertentu untuk mengumpulkan sejumlah uang dalam mendukung inisiatif pembayaran. Itu mengidentifikasi kemampuan negara tertentu untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk mendukung inisiatif regional. Akibatnya, PAD juga dapat

digambarkan sebagai rutinitas bisnis yang telah disetujui oleh pemerintah untuk menggunakan sumber daya dan hasil sejumlah uang untuk melaksanakan kewajiban dan menjaga.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi di suatu daerah, Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas Dikatakan Pasal 2 Ayat (2) Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Zumardi & Sanica et al., 2020).

Dalam konteks dari Otonomi Keuangan Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangannya agar tidak mengandalkan atau menjadi rentan terhadap bantuan pemerintah pusat. Untuk itu alasan pemerintah pusat menghimbau pemerintah daerah untuk mendukung PAD dalam rangkaian pilkada sebagai sarana desentralisasi, Agar prakarsa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta program-program penjangkauan publik berhasil, pendapatan asli daerah yang berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah itu sendiri harus terus ditingkatkan. Hal ini akan memungkinkan penyelesaian masalah otonomi daerah secara kaku, pantang menyerah, dan tanpa kompromi.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan mengelola PAD. Seiring dengan meningkatnya kemampuan kapasitas daerah untuk menghasilkan PAD, demikian pula komitmen daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan

daerah. Ini menunjukkan betapa pentingnya tolok ukur PAD bagi pemerintah daerah, proyek konstruksi, dan keselamatan publik. Negara sebagai bagian dari proses perencanaan pemerintah akan terwujud jika ada komitmen dari para pemimpin negara untuk memaksimalkan pembangunan negara melalui PAD setiap tahunnya.

Berdasarkan Pasal 79 UU 22/1999, PAD dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dan dapat diukur secara moneter. Ini karena kewenangan (otoritas) tersebut dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain yang sah dari komponen-komponen PAD. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah pajak dan retribusi daerah (Mahmudah et al., 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi." Menurut Anggoro (2017: 18), "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah" (Safitri et al., 2021).

Di masa otonomi daerah, pajak daerah adalah sumber pembiayaan yang paling penting, yang terdiri dari penerimaan yang berasal dari komponen pajak

daerah. PAD adalah sumber pembiayaan yang paling dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan dan pemerintahan, meskipun pajak daerah juga penting. pajak dan retribusi pemerintah daerah (Yulia et al., 2020).

Satu-satunya cara yang paling efektif bagi suatu daerah untuk melakukan otonomi adalah dengan mengamati titik terluas dari nilai tersebut. PAD yang dapat dicapai oleh wilayah tertentu itu. Menggunakan PAD sesuatu yang sederhana akan berdampak buruk bagi wilayah tersebut. Namun untuk memulai proses penyelenggaraan pemerintahan dan konstruksi substansial tanpa didukung oleh organisasi lain. Selama pemilihan ini, kota itu digulingkan untuk dapat mengurus dirinya sendiri (Lawati et al., 2018).

4. Konsep Pajak Hiburan

Pajak adalah pengalihan harta dari milik pribadi ke milik umum. Pemungutan pajak adalah hak negara, kewajiban dan masyarakat untuk membayarnya demi kepentingan bersama yang akan bermanfaat bagi semua orang di Indonesia. Pajak, menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy (2011), adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada kas negara dengan tidak menerima jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2009: 1), ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Dalam fungsinya sebagai penerimaan, pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan rutin.

b. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Menurut Teori Stakeholder, pemerintah akan memberi tahu masyarakat tentang kinerja finansial, lingkungan, intelektual, dan sosial. Dalam hal ini, hiburan akan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk semua orang yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Pada saat ini, pemerintah berfungsi sebagai pengatur. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan kepentingan pemerintah, seperti dalam hal pajak. Diharapkan perusahaan membayar pajak dengan taat dan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan manfaat langsung dari daerah. Sama dengan yang dapat dipaksakan oleh undang-undang dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan administrasi daerah. Namun, pajak daerah adalah pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang diberikan atau diberikan kepada individu atau badan tertentu. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah, penting bagi masyarakat untuk menjadi sadar dan peduli untuk membayar pajak, baik pajak daerah maupun pajak daerah (Zulfikar & Rahman et al., 2019).

Kepatuhan wajib pajak perlu diterapkan oleh pemerintah daerah agar masyarakat tertib dan terarah dalam pembayaran pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan kepatuhan material (Nurmantu, 2003). Studi Fermana (2013) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berdampak positif pada penerimaan pajak, lebih banyak kepatuhan wajib pajak berarti lebih banyak penerimaan pajak (Ardiansyah et al., 2019).

Kembar (2013) menyatakan bahwa pada skala nasional, peningkatan pendapatan ditunjukkan oleh Produk Nasional Bruto, sedangkan pada skala daerah, pertumbuhan perekonomian yang cepat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi disebutkan. Manik (2014) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang dapat mencapai masyarakat kecil, karena sektor-sektor ini memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Peningkatan PDB provinsi menunjukkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang baik. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pembangunan, menurut Oka dan Arka (2015), Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan adalah dua indikator kesejahteraan masyarakat. Kembar (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa efektif beberapa kebijakan ekonomi yang telah diterapkan sebelumnya (Sudarmana & Sudiarta et al., 2020).

Menurut Willis (2010: 4), dalam Watuseke Chlief dan S. Pangemanan (2016), pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggara hiburan. Selain itu, pajak hiburan juga dapat dianggap sebagai pungutan daerah atas penyelenggara hiburan, sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009, pasal 1, angka 24 dan 25. Pajak hiburan mencakup semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan acara sosial yang dibayar. Pemungutannya tidak berlaku untuk semua kabupaten atau kota di Indonesia, jadi pemerintah daerah setempat harus membuat peraturan tentang pajak hiburan di daerah mereka sendiri.

Dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam industri hiburan, Pemerintah Kabupaten Barru harus melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk pemilik bisnis hiburan, masyarakat setempat, serta ahli ekonomi dan lingkungan. Upaya kolaboratif semacam ini akan membantu mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan PAD sekaligus memastikan bahwa kegiatan industri hiburan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

Peran strategis sektor pajak hiburan dalam meningkatkan PAD adalah sangat penting dalam konteks keuangan pemerintahan daerah. Pajak hiburan adalah bentuk pajak yang dikenakan pada kegiatan hiburan atau rekreasi, seperti bioskop, teater, pertunjukan musik, dan acara olahraga. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak hiburan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Berikut adalah beberapa cara sektor pajak hiburan dapat berperan strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah:

1) Mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal

Pajak hiburan dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi lokal terkait, seperti industri hiburan dan pariwisata. Dengan meningkatnya aktivitas hiburan, maka ada potensi untuk pertumbuhan lapangan kerja dan investasi di Kabupaten Barru.

2) Sumber pendapatan alternatif

Selain dari hasil dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah yang diperoleh dari sumber lain milik pemerintah daerah. Lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu komponen penerimaan PAD. Jika jumlah dari komponen ini bertambah, maka PAD juga ikut bertambah dan dapat digunakan untuk kebutuhan daerahnya sendiri, (Mulyani & Ramdini et al., 2021). Pajak hiburan memberikan pemerintah daerah sumber pendapatan alternatif selain pajak-pajak lain seperti pajak properti atau pajak penjualan. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan yang terbatas dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

3) Potensi pendapatan tinggi

Kegiatan hiburan sering kali memiliki basis konsumen yang besar dan cenderung stabil. Oleh karena itu, pajak hiburan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan jika dikelola dengan baik dan diberlakukan secara adil.

4) Regulasi dan pengawasan kegiatan hiburan

Melalui pengenaan pajak hiburan, pemerintah daerah dapat memiliki pengendalian lebih besar terhadap kegiatan hiburan yang berlangsung di

kawasannya. Ini memungkinkan untuk mengatur aspek-aspek seperti izin, keamanan, dan standar kualitas.

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pendapatan yang dihasilkan dari pajak hiburan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah tersebut, seperti fasilitas umum, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan memberikan dampak positif pada kualitas hidup warga setempat.

6) Peningkatan keadilan pajak

Pajak hiburan dapat membantu mencapai prinsip keadilan pajak dengan memastikan bahwa kontribusi pajak berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang menikmati kegiatan hiburan, hal ini membantu mengurangi potensi kesenjangan dalam pembayaran pajak. Tetapi, untuk berhasil menerapkan strategi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa faktor kunci seperti tarif pajak yang sesuai, pengumpulan pajak yang efisien, penghindaran potensi dampak negatif terhadap sektor hiburan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan yang dihasilkan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikir dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka. Strategi pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah dapat mencakup berbagai aspek yang bersifat holistik dan melibatkan berbagai sektor termasuk pemerintah dan swasta untuk meningkatkan sektor keuangan daerah. Melihat kondisi lapangan yaitu Rendahnya realisasi pajak sektor hiburan dapat

mengurangi pendapatan pemerintah daerah dari sektor hiburan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menjawab rumusan masalah “bagaimana strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hiburan di Diana *Water Park*, Kabupaten Barru?” peneliti menggunakan teori Kotten dalam salusu (2006:104-105) dengan 4 indikator antara lain: strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, strategi kelembagaan yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir
Sumber: Menurut Kotten dalam salusu (2006: 104-105)

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam meningkatkan PAD sektor pajak hiburan di Diana *Water Park* Kabupaten Barru dengan menggunakan 4 indikator strategi pemerintah yaitu: strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, strategi kelembagaan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi gambaran indikator yang akan diteliti adalah:

1. Strategi Organisasi

Strategi ini melibatkan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif- inisiatif strategis baru. Pembatasan-pembatasan penting diperlukan untuk menentukan apa yang akan dilakukan dan untuk siapa. Strategi organisasi merujuk pada rencana dan langkah-langkah yang diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi ini melibatkan pengidentifikasian sumber daya organisasi, mengevaluasi lingkungan eksternal dan internal, serta mengembangkan rencana tindakan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

2. Strategi Program

Program merujuk pada rangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Peningkatan PAD dapat dicapai melalui berbagai strategi dan kebijakan fiskal termasuk dalam pemungutan pajak daerah sektor pajak hiburan berdasarkan UU Tahun 2021 tentang hubungan keuangan dan pemerintah daerah.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi pendukung sumber daya mencakup rencana dan tindakan yang dirancang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara efisien. Sumber daya melibatkan berbagai aspek, termasuk manusia, keuangan, teknologi, dan waktu. Strategi ini membantu organisasi memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi ini difokuskan pada maksimalisasi sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. sumber daya yang dimiliki digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi ini difokuskan pada maksimalisasi sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. Strategi Kelembagaan

Fokus strategi institusional adalah meningkatkan upaya organisasi dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Strategi kelembagaan mencakup rencana dan langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau lembaga untuk mengatur dan mengelola struktur, sistem, dan proses internalnya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024 sampai 31 Januari 2024 setelah seminar proposal.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru, dan Wisata Diana *Water Park*

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang meneliti kondisi sesuatu yang alami sebagai lawan dari eksperimen. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena subjeknya adalah hal-hal alami dan lingkungan alam. (Pebriana et al., 2021).

Metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2017, hlm. 7) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat dengan menggunakan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen). Dengan istilah deskriptif, hasil penelitian akan dijelaskan secara rinci tanpa menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

C. Informan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan jumlah informan yang dipilih adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan penelitian	Jabatan	Inisial
1.	Abdul Rauf., S.E, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pembangunan Bapenda Kabupaten Barru	AR
2.	St. Marwah Bakdur., S.AP	Staf Subbid. Pembukaan Dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Barru	MB
3.	Kurniadi., S.S	Staf Pariwisata Kabupaten Barru	
4.	Iriani	Pejabat Fungsional Dinas Pariwisata Kabupaten Barru	IR
5.	Hj. Umi	Pejabat Fungsional Dinas Pariwisata Kabupaten Barru	UM
6.	Sudarmanto	Pengelola Diana <i>Water Park</i>	SM
7.	Linda	Pengunjung Diana <i>Water Park</i>	LI
8.	Sulfiana	Pengunjung Diana <i>Water Park</i>	SU

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi dan studi literatur yang diperoleh dari jurnal penelitian, makalah, dan referensi atau rujukan dari penelitian sebelumnya.
2. Teknik wawancara, wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memahami tentang suatu persoalan.
3. Dokumentasi, salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi adalah semua bahan tertulis maupun film, gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena permintaan dari seorang peneliti. Studi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang dibuat oleh Lembaga yang menjadi bahan objek penelitian. Baik berupa peraturan, gambar, maupun laporan hasil pekerja.

E. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi data merupakan salah satu cara untuk memastikan keabsahan data kualitatif. Triangulasi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber yang berbeda atau melakukan pengamatan pada waktu yang berbeda. Ada beberapa jenis triangulasi yang umum digunakan, antara lain:

1. Triangulasi Sumber, Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti wawancara, survei, observasi, atau analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik, dapat dilakukan dengan cek data dari berbagai cara pengumpulan data. Contohnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, data dari ketiga Teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya.
3. Triangulasi Waktu, Waktu juga sering memengaruhi keandalan data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari, saat informan masih segar, mungkin kurang dapat diandalkan karena dapat memberikan data yang lebih valid tanpa banyak masalah. Oleh karena itu, untuk menguji reliabilitas data, dapat dilakukan wawancara, observasi, atau teknik validasi lainnya pada waktu dan kondisi yang berbeda.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses merapikan data, mengorganisirnya ke dalam pola, kategori, dan unit-unit uraian dasar. Penulis menggunakan empat kriteria teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian peneliti menggunakan tools analisis data kualitatif bernama Nvivo 12 *plus* untuk membantu memvisualisasikan hasil riset kualitatif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.

1. Deskripsi Dinas Parwisata Kabupaten Barru

Visi Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Barru Sesuai Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Barru tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Barru sebagai berikut:

”Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Asas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”.

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi yaitu:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM.
- c. Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat, nasional, regional dan internasional.
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif.
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik *Good Governance*

Visi dan misi tersebut di atas merupakan acuan untuk menetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sinergis dan strategi yang merupakan target tahunan yang tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 Dinas Pariwisata KabupSaten Barru.Sasaran strategik Dinas Pariwisata

Kabupaten Barru sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan yaitu:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan pelayanan publik
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 6) Program pengembangan pemasaran pariwisata
- 7) Program pengembangan destinasi pariwisata
- 8) Program pengembangan kemitraan
- 9) Program pengembangan ekonomi kreatif

Jumlah wisata yang ada di Kabupaten Barru dari tahun 2021 sampai 2023 pasti mengalami penambahan, tetapi wisata yang ada di kabupaten Barru banyak yang terbengkalai karena wisata ini hanya dibuat namun tidak ada perawatan hal ini diakui langsung oleh pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kabupaten Barru, dalam pembentukan wisata ada beberapa tahapan yang harus dilihat termasuk tempatnya yang menjadi penilaian sehingga bisa dikatakan sebagai tempat wisata. Adapun berbagai macam tempat wisata ada di Kabupaten Barru yang bisa dinikmati oleh wisatawan mulai dari wisata alam, buatan, Bahari, dan budaya.

Tabel 4.1 Jumlah Wisata Kabupaten Barru

Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya
10	1	7	3

Sumber Data: <https://disparpora.barrukab.go.id/destinasi>

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa kategori wisata alam lebih banyak dibandingkan dengan wisata lainnya dan yang paling sedikit kategori wisatanya adalah wisata buatan.

2. Deskripsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

a) Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Barru

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru adalah unsur pelaksanaan Otonomi daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu daerah di bidang pendapatan daerah.

Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kesekretariatan, yang menunjang tugas organisasi.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan.
- 3) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran pendataan dan penetapan.
- 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pembukaan dan pelaporan.
- 5) Pelaksanaan administrasi badan, dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Analisis strategi program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal

Adapun analisis lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal

1.) Kekuatan

- a.) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37).
- b.) Kebijakan Bupati Barru dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- c.) Pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- d.) Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah
- e.) Kerjasama dan semangat kerja staf yang tinggi

2.) Kelemahan

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana
- b) Masih rendahnya profesionalisme aparat
- c) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang
- d) Jumlah aparatur dibanding yang terampil dengan beban tugas masih kurang

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Peluang

- a) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c) Dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.
- d) Kerjasama antara Muspinda dan Instansi Vertikal lainnya.
- e) Adanya dukungan Pemerintah Pusat.

2) Ancaman

- a) Rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat.
- b) Rendahnya tingkat keterampilan/kemampuan aparat dalam penguasaan teknologi yang berbasis komputer.

b) Visi Misi Bapenda Kabupaten Barru

1. Visi

Berdasarkan fungsi dan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah kabupaten Barru dan mempertimbangkan isu strategi yang ada, maka visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengacu pada Visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Aza, dan Bermartabat Yang Berdasarkan Keagamaan”

Selanjutnya dari visi tersebut dapat diuraikan tentang makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Lebih maju, mengandung arti peningkatan berbagai indikator pembangunan akan lebih baik seperti: pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai indikator sosial, ekonomi, dan politik.
- b. Sejahtera, mengandung arti Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat Barru.
- c. Taat Azas, mengandung arti pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum, dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal.
- d. Bermartabat, mengandung arti bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
- e. Bernafaskan keagamaan, mengandung arti seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan Masyarakat didasarkan pada nilai- nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.

2. Misi

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengacu pada Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan akseibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan dasar. Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri dari pelayanan

pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang difokuskan pada pengendalian harga dan ketersediaan pangan.

- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal.

Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kondisi tentram, tertib, dan aman, melalui pengembangan seni budaya lokal.

- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal

Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara, dan mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah sehingga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dalam menunjang perekonomian daerah.

- d. Meningkatkan daya asing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategi perekonomian daerah dengan memastikan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

- e. Mewujudkan pemerataan pendapatan, Pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan.

Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan Masyarakat pedesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang akuntabel teknologi informasi.

Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan pelayanan publik yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi.

- g. Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama yang terdiri dari peningkatan kualitas pelayanan keagamaan.

3. Diana Water Park

Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa. Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap, Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sebelah Barat dengan selat Makassar. Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas Wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari Mancanegara. Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah datar hingga landai.

Diana *Water Park* terletak di Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, jaraknya sekitar \pm 19 Km dari pusat kota Barru. Dapat di tempuh menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Diana Waterpark adalah objek wisata dengan wahana air di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Mengusung konsep alami dengan taman bunga, lokasi ini berada pada lahan yang cukup luas. Berada pada wilayah perbukitan yang hijau, kawasan ini terlihat asri dan eksotis.

Wisata ini sangat cocok sebagai destinasi berlibur bersama keluarga di akhir pekan. Dengan waterpark, taman bermain, serta berbagai sudut dengan daya tarik ornamen-ornamennya bagi wisatawan. Tempat ini juga menawarkan sajian pemandangan alam dari ketinggian yang memukau.

Berikut adalah daftar pengunjung wisata Diana *Water Park* pada tahun 2021- 2023:

Tabel 4.2 Jumlah Pengunjung Diana *Water Park* Tahun 2021-2023

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
14,754 Orang	19,825 Orang	25,492 Orang

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten Barru

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung Diana *Water Park* dari tahun 2021, 2022, 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain jumlah pengunjung yang terhitung, adapun realisasi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hiburan di Diana *Water Park* pada tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Realisasi PAD sektor pajak hiburan Diana *Water Park*

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Rp. 375.000	Rp. 700.000	Rp. 5.625.000

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 realisasi PAD sangat sedikit, hal ini terjadi karena adanya Covid-19 pada tahun tersebut, selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 realisasi PAD sektor pajak hiburan sudah mengalami peningkatan.

Adapun jumlah pendapatan asli daerah pada tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 4.4 jumlah PAD kabupaten Barru tahun 2021-2023

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Rp. 942.029.873.041	Rp. 170.082.180	Rp. 600.000.000

Sumber Data: PPID Barru

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 3 tahun terakhir pendapatan asli daerah Kabupaten Barru mengalami jumlah naik turun, pada tahun 2021 jumlah pad lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami jumlah penurunan pendapatan.

B. Hasil Penelitian

Peneliti mengemukakan atau mengangkat masalah dan menggunakan indikator teori dalam kerangka pikir untuk melakukan penelitian dan menemukan solusi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan untuk menjawab masalah, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis kualitatif, yaitu

penampilan data atau pengungkapan fakta-fakta dalam bentuk naratif, akan digunakan untuk menganalisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengevaluasi hasil observasi dan wawancara sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi

Mengidentifikasi berbagai metode umum yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan adalah bagian penting dari strategi organisasi. Jadi strategi organisasi adalah pola atau rencana yang menggabungkan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan dua cara: melalui pengelolaan yang lebih baik atas apa yang sedang dilakukan. Berikut kutipan wawancara dengan informan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan strategi program. Berikut kutipan wawancaranya:

“kita harus paham kalau di perpajakan daerah itu ada dua sistem yang dipakai ada namanya *Self Assessment* dan *Official Assessment*, *Self assessment* artinya wajib pajak yang menghitung sendiri omsetnya kemudian melaporkan di Bapenda, contoh *Self Assessment* ini seperti pajak hiburan di Diana *Water Park* misalnya, hanya segini omset yang saya dapat setiap bulannya 5 juta, itu nanti 5 juta dikali besaran tarif untuk pajak hiburan dikali 35% atau 50%. Tentunya kita tidak bisa langsung percaya begitu saja artinya kalau pengusaha menganggap bahwa pajak sekian saya terima cuman 5 juta padahal kenyataannya 10 juta ada namanya penghinaan pajak, jadi kita bekerja disini sudah dibatasi bahwa sekian paling tinggi. Khusus di Barru peraturan berlaku di bulan Januari kemarin tarif paling tinggi kita pasang 40%, jadi pajak PJBT/pajak hiburan di Diana *Water Park* kemarin sekitar 15% sekarang kita turunkan menjadi 10%. waktu yang diberikan kepada wajib pajak adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan perda paling lama 3 bulan

kalender, jika lewat dari itu maka denda yang diberikan sebesar 2%.”
(Hasil wawancara , 22 Januari 2024)

Sebagaimana hasil wawancara di atas dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dapat dipahami bahwa sistem yang dipakai dalam perpajakan sudah terstruktur sesuai aturan yang berlaku. Berbagai kebijakan yang telah diberikan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan Peraturan yang diterapkan. Komentar lain dari Informan Pengelola Diana *Water park*. Berikut kutipan wawancaranya:

“Pajak disini tergantung tiketnya mau 10 persen kah, saya kurang tau dari pada saya nanti menjelaskan keliru 10 persen itu target misalnya 1 unit permainan ini terbilang 1 juta padahal tidak, Kembali lagi tergantung tiketnya, jadi kalau ramai pengunjung dia dapatnya 1 bundel itukan 1 juta kalau tidak salah itu masuk pendapatan daerah 100 ribu begitu. Jadi, hitungannya pertiket bukan hitungan bulanan gituloh, jadi Bapenda tidak tentu dapatnya 100 ribu atau 15 ribu. Kalau macam disini pemerintah pajaknya ada 2 yang sesuai pendapatan, ada sistem dia tempat disitu dia kena pajak, ada macam golonganlah istilahnya, ada borongan dan perpenumpang kalau Diana *Water Park* suatu bangunan yang berdiri diatas lahan itukan istilahnya kena pajak untuk tempat wisatanya, orang yang air saja ada pajaknya untuk org pakai sumur bor.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas dengan Pengelola Diana *Water Park* menggambarkan bahwa pajak yang dibayar per wahana hanya yang memiliki legalisir dari badan pendapatan daerah dan jumlah yang dibayar tidak memiliki target beda halnya ketika pendapatan daerah yang didapat perbulan sesuai tagihan pajak dari badan pendapatan daerah itu sendiri. Selain itu, Informan pejabat fungsional dinas pariwisata Kabupaten Barru memperkuat argumen mengenai pajak soal karcis yang masuk. Berikut kutipan wawancaranya:

“Koordinasi ke badan pendapatan daerah itu tetap, koordinasinya itu mengenai karcis yang ada, nanti pengelola yang setor ke dinas Pariwisata terus nanti kita yang bawa ke badan pendapatan daerah. Karcisnya yang

dari badan pendapatan daerah dihitung berapa jumlahnya nanti kita cocokkan karcis yang masuk dari pengelola, yang sering komunikasi ke badan pendapatan daerah itu Bendahara PAD.” (Hasil wawancara, 31 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas dengan pejabat fungsional dinas pariwisata

Kabupaten Barru hal ini bisa dilihat bahwa pembayaran pajak tergantung berapa jumlah karcis yang diberikan oleh badan pendapatan daerah dan berapa jumlah karcis yang dikeluarkan oleh Pengelola dan kemudian disektor ke dinas pariwisata yang akan menjadi pembayaran pajaknya.

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam hal strategi organisasi adalah mengembangkan rencana tindakan yang merinci langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk menerapkan strategi. Dalam evaluasi pengendaliannya yaitu:

- a. Menyusun sistem pengukuran kinerja seperti mengevaluasi kinerja organisasi, contohnya menilai tingkat retensi karyawan, waktu respons layanan pelanggan untuk memantau kemajuan terhadap tujuan.
- b. Menerapkan target jika diperlukan dan memastikan konsistensi dengan strategi yang telah ditetapkan.

2. Strategi Program

Strategi ini lebih fokus pada konsekuensi strategi program tertentu. Apa yang akan terjadi pada organisasi dan kelompok sarannya jika program tertentu diluncurkan atau diperkenalkan? Strategi ini menentukan apakah program tersebut bermanfaat bagi institusi dan tujuan organisasi atau malah berdampak negatif. Berikut kutipan wawancara dengan informan Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Pendapatan Daerah terkait strategi Program. Berikut kutipan wawancaranya:

“hampir setiap tahun kita melakukan yang namanya sosialisasi, kemudian kita lakukan pendataan-pendataan mengenai wajib pajak yang potensial, wajib pajak yang bisa dikatakan contoh kecil saya bicara di luar konteks hiburan misalnya, seperti Rumah Makan setiap tahun ada yang baru lagi, kemudian ketika kita melihat ada yang seperti itu, kita melakukan pendataan kemudian selanjutnya kita melakukan pemungutan pajak. Dalam sosialisasi juga kami selalu sampaikan bahwa betapa pentingnya membayar pajak walaupun terus terang saya sampaikan bahwa kita ini di Barru pajaknya sangat sedikit cuman sekitar 20 miliar lebih. Jadi, memang ketika kita mengharapkan pajak daerah untuk membiayai Pembangunan tidak bakalan cukup, itu cuman cukup untuk menggaji pegawai di Kabupaten Barru selama 1 bulan.” (Hasil wawancara, 22 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pemungutan pajak tahap awal yang diambil oleh pemerintah adalah observasi terhadap wajib pajak yang potensial, hal ini dilakukan agar pajak daerah bisa meningkat dengan potensi yang dimiliki setiap kategori pajak yang ada di Kabupaten Barru. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun cara tersebut masih kurang efektif mengingat pajak daerah pada umumnya masih rendah. Wawancara lain dengan informan selaku Staf Subbid. Pembukaan dan Pelaporan Bapenda Kabupaten Barru. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam pengawasan pembayaran pajak kami selalu memantau pelaku usaha wajib pajak, ada alat khusus dipakai yaitu alat *M POS* dimana alat ini dipasang oleh orang ketiga yang terhubung langsung ke komputer pelaku usaha. Terkait mengenai penagihannya ketika ada pelaku usaha yang belum lunas pembayaran pajaknya pada bulan ini atau hanya membayar setengah maka bulan depan harus dilunasi, pihak yang bekerja sama dengan Bapenda yang selalu turun untuk menagih pelaku usaha itu. Dalam pembayaran pajak bisa dilakukan secara online dan manual, tahun

ini kami baru mengkoordinasikan dengan pihak bank daerah agar kedepannya pembayaran bisa dilakukan secara online semua.” (Hasil wawancara, 22 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengawasan sudah berbasis teknologi maka dari itu pelaku usaha wajib pajak tidak perlu khawatir mengenai pajak yang akan dibayar nantinya karena pelaku usaha dapat dengan mudah melihat jumlah uang yang masuk secara otomatis di komputer mereka masing-masing. Kemudian pemerintah memberikan kebijakan kepada pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak sehingga pelaku usaha tidak terlalu terbebani soal pembayaran pajak tersebut. Namun, kebijakan tersebut memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Bapenda Kabupaten Barru.

Informan dengan pengelola wisata Diana *Water Park* ikut berkomentar.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Sebenarnya kita bukannya gak mau bayar pajak apa istilahnya gak taat pajak, tapi yang dari sananya tidak memberikan tagihan, saya tanya kenapa tagihannya sampai 4 bulan itu gak ada tagihan, yah karena petugas yang biasa merekap pajak tagihannya itu pindah tugas atau keluar gituloh jadi gak ada dibagian itu. Semenjak saya yang jadi pengelola disini saya selalu konfirmasi sama orang Dinas gituloh, pake wa pribadi selalu lapor laporan kunjungan, laporan pajak juga selalu saya lapor, masa kita yang mau bayar kita yang ini seharusnya tagihannya dulu yang keluar .” (Hasil wawancara, 30 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas dengan pengelola wisata Diana *Water Park* adalah wajib pajak yang setiap bulan harusnya membayar pajak menjadi tertunda karena kurang efektifnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak.

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal strategi program adalah Membuat rencana yang merinci langkah- langkah seperti implementasi

program sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Pastikan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dan pantau kemajuan pelaksanaan secara teratur. Hal yang diperlukan juga adalah sumber daya yang baik dalam hal SDM, teknologi, dan keuangan. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan daerah.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Barru sangat kurang terutama pada pajak hiburan. Hal ini diakui oleh Bapenda sendiri karena dalam kategori pajak hiburan termasuk tempat karaoke di Kabupaten Barru banyak yang gulung tikar sehingga strategi pemerintah sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan tempat yang memiliki potensi besar terhadap pajak melalui cara bekerja sama dengan instansi lain. Adapun wawancara dilakukan dengan Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Barru. Berikut kutipan wawancaranya:

“Selama ini kita tetap promosikan potensi semua daya tarik yang ada di Kabupaten Barru, kita bukinkan videonya, kita posting di Instagram, pokoknya semua di media sosial, kita punya tanggung jawab mempromosikan semua daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Barru meskipun Diana *Water Park* milik pribadi tetapi kita masih tetap berkoordinasi pihak disana terkait jumlah kunjungan wisatawanannya setiap bulan kita ambil datanya itu, tetap data kunjungan kita minta tapi retribusinya untuk pemasukan tidak ada yang masuk ke PAD, kalau mengenai pajak ada beberapa termasuk pajak resto, hotel, hiburan.” (Hasil wawancara, 24 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa strategi pemerintah dalam hal memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Barru melalui media sosial merupakan hal kreatif mengingat sekarang sudah zaman teknologi, cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa menarik

banyak orang untuk berkunjung di Kabupaten Barru terutama di *Diana Water Park*, semakin banyak wisatawan yang berkunjung semakin tinggi omset yang didapat oleh pengelola setempat kemudian ini mempengaruhi pajak daerah yang di berlakukan di *Diana Water Park*

Informan pejabat fungsional Dinas Pariwisata ikut berkomentar. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kita buat Video yang tempat wisata sebagai promosi, apa lagi yang milik Pemerintah, kemudian ada pamflet kita bagikan kalau ada pameran atau pertemuan, Barru sebenarnya untuk Promosinya belum maksimal apalagi *Diana Water Park* kan ditaumi bilang swasta harusnya juga dia bikin sendiri Instagramnya, Facebooknya, ini malah tidak ada., bisa juga dia kerjasama dengan bidang Pariwisata bagaimana ini, bagaimana ini toh caranya, nda pernah juga konsul kesini, jadi kita juga masa bodoh.”(Hasil wawancara, 31 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa untuk menarik pengunjung dengan cara promosi agar orang lokal dan luar daerah mengetahui keindahan yang dimiliki oleh Kabupaten Barru. Tetapi disisi lain komunikasi yang tidak efektif dan kurangnya kerjasama yang dibangun antara pemilik wisata dan Dinas Pariwisata untuk melakukan promosi wisata. Selain itu, Informan pengelola wisata *Diana Water Park* membenarkan hal tersebut. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau Instagram kesannya lebih kepribadi cuman nama labelnya dipakai, jadi kurang yah coba kamu bisa buka punya saya di Jatipark disitu semua ada Facebook, Instagram, Tiktok, kalau disini kurang ada yang update. Saya juga sudah ajukan mau promo penawaran, misalnya ini loh video barangkali setel nyata di laptop itukan terkesan wah cantik lalu saya bawa keSekolah-sekolah bisa juga diterapkan diskon bagi anak sekolah yang berkunjung itukan semua tehnik marketing, tapi kembali lagi kepemangku kebijakan dia yang punya kalau kesannya kalau tidak ada yang renang ibarat renang sendiri lah, pekerja disini juga itu kurang SDM dan banyak tidak lulus SD” (Hasil wawancara, 30 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas kurangnya kinerja terhadap hal promosi wisata yang menyebabkan kurangnya wisatawan yang berkunjung setiap hari, kemudian orang-orang yang bekerja disitu tidak memiliki pendidikan sesuai dengan bidangnya, mereka hanya modal pengalaman kerja. Disisi lain tidak adanya perhatian khusus pemilik wisata untuk tempat wisata yang telah dibangun.

Dalam strategi sumber daya pendukung yang diperlukan adalah Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif melibatkan perekrutan dan pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata memerlukan pendekatan yang strategis dan terencana. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- a. Identifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja, dengan cara menentukan jenis pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan dalam industri pariwisata untuk meningkatkan PAD daerah. Ini dapat mencakup perhotelan, pemandu wisata, petugas layanan pelanggan, dan sebagainya.
- b. Pengembangan Keterampilan Khusus, dengan cara memberikan pelatihan tambahan atau kursus untuk mengembangkan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam industri pariwisata, seperti keterampilan komunikasi, pelayanan pelanggan, manajemen waktu, dan pengetahuan lokal atau bahasa asing.

4. Strategi Kelembagaan

Menurut ahli kelembagaan, struktur kelembagaan menentukan rentang alternatif manusia. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, mereka berfungsi sebagai media atau wadah untuk

membentuk pola yang tetap, dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan harus dilakukan melalui pola-pola ini. Berikut kutipan wawancara dengan informan Staf Subbid. Pembukaan dan Pelaporan dengan strategi Kelembagaan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kami memprioritaskan intensifikasi penerimaan pajak yang belum mencapai target. Disini kami bekerja sama dengan kolektor kinerja pekerja lapangan dalam hal ini melakukan penagihan ke wajib pajak apabila pelaku usaha sudah jatuh tempo tapi belum melunasi pajaknya, selanjutnya kami memastikan tempat hiburan sebagai objek pajak memiliki legalitas hukum artinya memiliki surat izin usaha, data-data yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah bisa di cek Melalui Aplikasi Monita.” (Hasil wawancara, 22 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis strategi evaluasi dan pemantauan terkait kinerja kelembagaan dalam meningkatkan PAD melalui pajak hiburan sudah sesuai prosedur, aturan dan hukum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru. Dengan demikian pemerintah selalu punya rencana perbaikan kelembagaan untuk mendukung efisiensi pengumpulan pajak hiburan.

Berikut wawancara lain dengan informan pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kabupaten Barru. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau berbicara strategi maka kami bekerjasama dengan Duta Pariwisata Kabupaten Barru ada namanya persatuan organisasi Padatta, semua duta wisata sebelumnya mau itu 2020 sampai 2023 mereka punya grup untuk berkoordinasi disitu ada yang mau dipelajari lagi istilahnya pelatihan dari duta wisata sebelumnya, duta wisata juga ini tugasnya promosi tempat yang ada di Barru termasuk untuk menarik pengunjung untuk berwisata agar PAD kita juga bertambah.” (Hasil wawancara, 31 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas dengan pejabat fungsional Dinas Pariwisata menggambarkan bahwa kerjasama itu penting dalam mencapai tujuan yang kita mau targetkan, melihat kondisi wisata di Kabupaten Barru yang minim

pengunjung maka otomatis PAD juga menurun. Namun disisi lain ketika lembaga itu ada maka harus ada bekal yang mereka bawa untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam bekerja agar visi misi misa terwujud. Informan pejabat fungsional Dinas Pariwisata membenarkan argumen dari informan pejabat fungsional lainnya mengenai kerjasama ini. Berikut kutipan wawancaranya:

“Duta pariwisata ini memang ada sejak dulu karena ini programnya Dinas Pariwisata, lagi hebohnya ini duta pariwisata akhir-akhir ini mami 2 tahun terakhir, jadi setiap mau ada kegiatan baik itu dibidang olahraga yah mereka ikut, jadi kalau ada lagi yang mau dikerja misalnya bulan 5 yah kami suruh memangmi terjun kelapangan bulan 3, terkait mengenai kerjasama kami juga disini semua bekerjasama dengan instansi yang ada di Barru, apa lagi di Bapenda yang terkait masalah PAD”. (Hasil wawancara, 31 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas dengan pejabat fungsional Dinas Pariwisata adalah duta pariwisata ini bergerak bukan hanya sekedar promo dan memperkenalkan tempat wisata saja tetapi mereka juga terlibat kerjasama dengan berbagai bidang ada.

Berikut juga wawancara yang dilakukan oleh informan pengelola Diana Water Park. Berikut kutipan wawancaranya:

“Saya syok disini kadang pekerja disini pake celana pendek, kurang rapih, pakaian kayak mau pergi kesawah kayak saya, katakanlah ini sebuah organisasi/lembaga, kan harus mempunyai struktur direksinya siapa? Manajer operasionalnya siapa? ini tidak ada sama sekali. Makanya saya garis bawah ini mau bagaimanapun kalau tidak ada perombakan tidak akan maju, sulit sekali kalau ada rombakan baru bisa.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat kita lihat bahwa struktur yang ada di Diana *Water Park* tidak ada yang pasti, kecuali pengelolanya yang tetap. Dibalik potensi yang dimiliki oleh Diana Water Park tidak akan terkelola

dengan baik apabila strukturnya tidak ada, hal ini juga bisa berpengaruh terhadap keinginan pengunjung untuk berwisata 2 kali di tempat yang sama. Pendapat yang dikatakan oleh informan salah satu pengunjung Diana *Water Park*. Berikut kutipan wawancaranya:

“Pertama kali saya kesini tapi sudah sepi memang, tapi ini karena mungkin bukan hari libur kantor terus disini tidak ada yang arahkan ki, tidak ada juga yang sapa ataukah semacam pemandu begitu, kalau tamannya cantik sekali cuman pelayanannya yang masih kurang.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas dengan pengunjung bisa kita katakan bahwa Diana *Water Park* yang memiliki keindahan yang memanjakan mata. Namun disisi lain pelayanan yang kurang ramah membuat pengunjung bingung dalam mengeksplor tempat tersebut. Hal yang serupa yang dikatakan oleh informan pengunjung Diana *Water Park*. Berikut kutipan wawancaranya:

“Saya tertarik kesini karena spot fotonya yang bagus, banyak wahana permainannya, tempatnya yang asri baru cantik pemandangannya, sekalian liburan jauh juga, cuman itu kolamnya kurang bersih airnya lain-lain warnanya jadi tidak tertarik untuk mandi, mungkin bisa diganti itu biar sejuk juga kalau mauki berenang.” (Hasil wawancara, 30 Januari 2024)

Hasil wawancara dengan pengunjung bisa di katakan Diana *Water Park* merupakan tempat yang strategis untuk berwisata, pemandangan yang indah yang menarik pengunjung kemudian tempat ini cocok untuk anak-anak karena ada wahana yang bisa mereka nikmati, tetapi disisi lain perawatan wisata kurang diperhatikan sehingga sebagian besar wisata hanya datang untuk melihat wisatanya saja untuk menuntaskan rasa penasaran mereka.

Pengembangan struktur organisasi dalam strategi kelembagaan sangat dibutuhkan melihat kondisi yang terjadi dilapangan bahwa untuk mencapai target yang diinginkan maka dibutuhkan organisasi yang terstruktur dengan jelas, maka strategi yang perlu dilakukan adalah:

- a. Alur kerja yang jelas dan efektif mendukung efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Memastikan alur komunikasi yang efektif dan koordinasi antar bagian.
- c. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian di atas menggunakan 4 indikator yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, strategi kelembagaan maka peneliti menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Tabel 4.5 Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p>Kekuatan (Strengths) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mengatur banyak hal, seperti pembagian pendapatan pajak, dana transfer, pengelolaan keuangan daerah, mekanisme pelaporan, dan pengawasan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk membuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jelas dan adil, sehingga pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan layanan publik kepada rakyatnya. Setiap undang-undang akan mengatur bagaimana dana</p>	<p>Peluang (Opportunities) 1. Inovasi Program dan Layanan: Organisasi dapat mengidentifikasi dan menerapkan inovasi dalam program dan layanan mereka melalui riset dan pengembangan. Ini memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang. 2. Pengembangan Kapasitas Institusional, Meningkatkan kapasitas institusional organisasi, yang mencakup struktur organisasi, manajemen, dan kepemimpinan, dapat meningkatkan daya tahan dan kemampuan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. 3. Pengembangan Keterampilan</p>

<p>didistribusikan, membayar, bagaimana melaporkan, dan konsekuensi dari pelanggaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.</p>	<p>Karyawan, Program pelatihan dan pengembangan karyawan dapat membantu anggota organisasi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang untuk inovasi dan peningkatan efisiensi.</p> <p>4. Mensosialisasikan tentang pajak di beberapa kecamatan</p>
<p>Kelemahan (Weaknesses)</p> <p>1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, yang sesuai dengan kebutuhan program-program organisasi dapat menjadi kelemahan.</p> <p>2. komunikasi yang Buruk, Komunikasi yang buruk antara berbagai unit atau level organisasi dapat menghambat kerja sama dan koordinasi yang penting untuk menerapkan strategi program.</p>	<p>Ancaman (Threats)</p> <p>1. Perubahan Teknologi, Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat program atau layanan yang ada menjadi usang atau kurang relevan. Akibatnya, organisasi harus memperbarui dan menyesuaikan infrastruktur teknologi mereka untuk mengantisipasi perubahan ini.</p> <p>2. Ketidakseimbangan Sumber Daya, Sebuah organisasi dapat mengalami kesulitan melaksanakan strateginya karena kekurangan sumber daya seperti karyawan, atau infrastruktur.</p> <p>3. Ketidakstabilan struktur organisasi sehingga dapat menurunkan kualitas layanan.</p>

Tabel 4.6 Matriks SWOT Strategi Pemerintah Daerah

INTERNAL	Kekuatan (Strenghts) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Kelemahan (Weakness) 1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan program 2. Komunikasi yang buruk
EKSTERNAL		
Peluang (Opportunity) 1. Inovasi program dan layanan 2. Pengembangan	Strategi S-O 1. Mengadakan sosialisasi di kecamatan yang bekerjasama dengan	Strategi W-O Pemerintah setempat ditugaskan untuk wajib menyampaikan terkait UU yang berkaitan tentang

3. kapasitas institusional 4. Pengembangan keterampilan karyawan	pemerintah setempat. 2. Membuat pelatihan penggunaan teknologi, keterampilan multibahasa, manajemen konflik dan keterampilan pemandu wisata.	pemungutan pajak sebagai bentuk sosialisasi taat pajak. melibatkan investasi dalam pelatihan teknologi dan pengimplementasian solusi baru.
Ancaman (Threat) 1. Perubahan teknologi 2. Ketidakseimbangan sumber daya 3. Ketidakstabilan struktur organisasi	Strategi S-T Pemerintah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak melalui alat M POS	Strategi W-T melibatkan pembentukan tim khusus untuk memantau dan menanggapi perubahan regulasi dengan cepat.

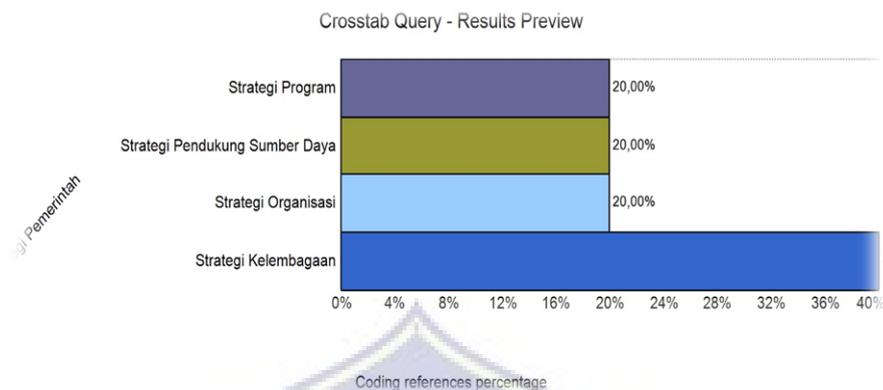
1. Strategi SO adalah Strategi ini menekankan pemanfaatan kekuatan internal (Strengths) organisasi untuk mengambil peluang (Opportunities) eksternal yang ada
2. Strategi ST adalah Strategi ini fokus pada pemanfaatan kekuatan internal (Strengths) untuk mengatasi ancaman (Threats) eksternal yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi.
3. Strategi WO adalah Strategi ini fokus pada upaya mengatasi kelemahan internal (Weaknesses) suatu organisasi dengan memanfaatkan peluang eksternal (Opportunities) yang ada.
4. Strategi WT adalah Strategi ini berfokus pada cara mengelola atau mengurangi kelemahan internal (Weaknesses) yang dapat memperburuk dampak dari ancaman eksternal (Threats)

C. Pembahasan

Setiap kabupaten/kota memiliki kelebihan dan kekurangan, jika Kota Makassar memiliki banyak Hotel bertingkat, Mall, tempat wisata maka Kabupaten Barru memiliki kekayaan alam yang melimpah diantaranya sektor industri pertanian, Perkebunan, peternakan, kehutanan. Pendapatan asli daerah penting bagi setiap daerah agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya tanpa bergantung penuh pada dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dapat dijelaskan bahwa rendahnya pendapatan asli daerah sektor pajak hiburan kabupaten Barru disebabkan oleh kurangnya potensi hiburan yang dimiliki, berbeda dengan penelitian terdahulu pajak hiburan dan pajak lainnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah karena banyaknya jenis hiburan yang ada di kota tersebut seperti tontonan bioskop yang banyak peminatnya, Club dan sebagainya. Kabupaten Barru yang dijuluki sebagai kota santri tidak bisa berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah khususnya pada pajak hiburan. Strategi pemerintah yang didefinisikan dalam teori Kotten dalam salusu yaitu (1) strategi organisasi, (2) strategi program, (3) strategi pendukung sumber daya, (4) strategi kelembagaan. Dalam penelitian ini untuk melihat *software* Nvivo 12 *plus* sebagai berikut:

Grafik 4.1 Indikator strategi pemerintah dalam teori Kotten



Sumber Data: Visualisasi Nvivo 2024

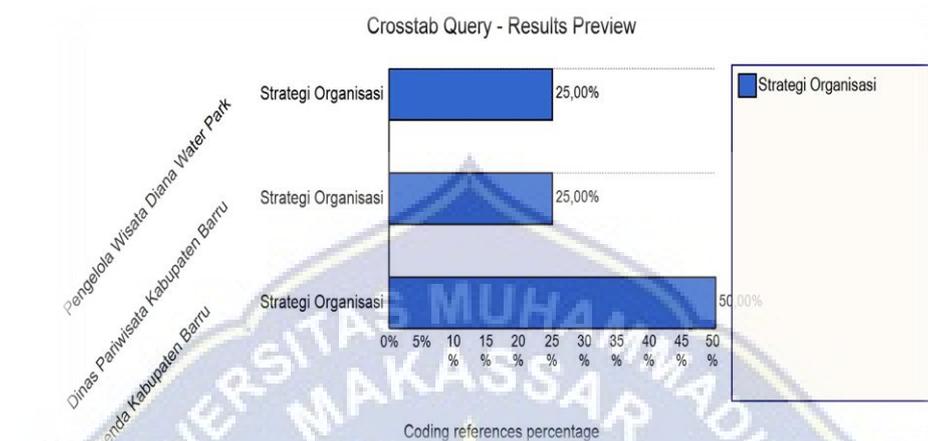
Hasil analisis data melalui *software* Nvivo 12 *plus* menunjukkan bahwa yang paling mendominasi dari hasil analisis tersebut yaitu strategi kelembagaan mendapat nilai 40 dari skala 15, Strategi kelembagaan dalam hal ini pengelola Diana Water Park membuat icon yang menarik untuk menambah keindahan wisata ini agar pengunjungnya selalu bertambah tiap tahunnya. strategi program mendapat nilai 20 dari skala 15, strategi pendukung sumber daya 20 dari skala 15, strategi organisasi 20 dari skala 15. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan tiap indikator sebagai berikut:

1. Strategi organisasi

Strategi organisasi yang terjadi di lapangan kebijakan yang di berikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha wajib pajak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini badan pendapatan daerah Kabupaten Barru bekerja dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku jadi apapun kebijakan yang mau dikeluarkan harus berpedoman pada aturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini untuk melihat strategi organisasi dapat diolah melalui *software* Nvivo 12 *plus* sebagai berikut:

Grafik 4.2 Strategi Organisasi



Sumber Data: Visualisasi Nvivo 2024

Hasil analisis data melalui *software* Nvivo 12 *plus* menunjukkan bahwa yang paling mendominasi dari hasil analisis tersebut yaitu badan pendapatan daerah Kabupaten Barru mendapat nilai 50 dari skala 15, hal ini karena strategi organisasi dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan yang tepat. Badan pendapatan asli daerah perlu memiliki kebijakan yang mendukung pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, dengan cara yang efektif dan efisien, sedangkan dinas pariwisata Kabupaten Barru mendapat nilai 25 dari skala 15, pengelola wisata *Diana Water Park* mendapat nilai 25 dari skala 15.

2. Strategi program

Dalam penelitian ini, strategi program dapat dilihat dari berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan badan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Program adalah sekumpulan aktivitas dan

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengubah kelompok sasaran tertentu.

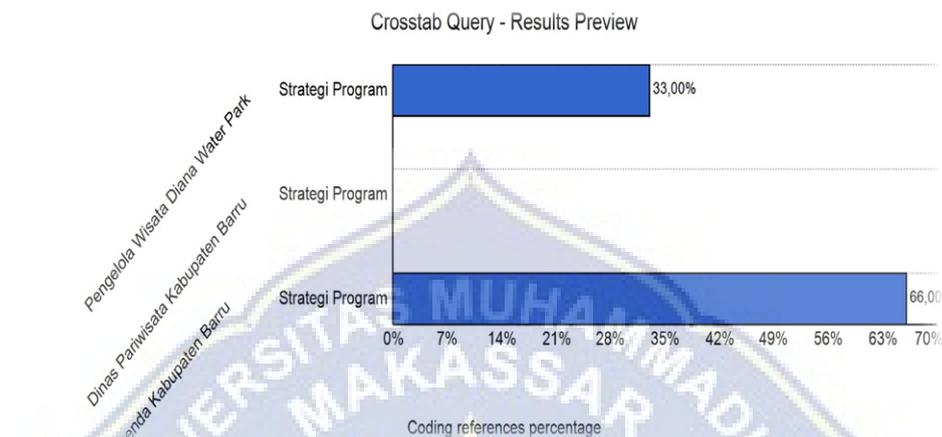
Salah satu program dinas pariwisata adalah pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi wisata, pembentukan duta pariwisata, dan program badan pendapatan daerah, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2019 yaitu:

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- d. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- e. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
- f. Penetapan wajib pajak daerah
- g. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- h. Penagihan pajak daerah
- i. Pengendalian pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Barru setiap instansi telah melaksanakan program yang ditetapkan dengan baik, hanya saja ada beberapa program yang dijalankan belum maksimal termasuk pelayanan kepada wajib pajak. Pada dasarnya, setiap organisasi pasti memiliki strategi, termasuk kegiatan dan program, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Efek dari program dan kegiatan ini akan terlihat dari bagaimana mereka menjalankan programnya. Meskipun berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tidak tapi kenyataannya pendapatan daerah belum mencapai

target. Dalam penelitian ini untuk melihat strategi program dapat diolah melalui *software* Nvivo 12 *plus* sebagai berikut:

Grafik 4.3 Strategi Program



Sumber Data: Visualisasi Nvivo 2024

Hasil analisis data melalui *software* Nvivo 12 *plus* menunjukkan bahwa yang paling mendominasi dari hasil analisis tersebut yaitu badan pendapatan daerah Kabupaten Barru mendapat nilai 66 dari skala 15, salah satu program badan pendapatan daerah Kabupaten Barru adalah Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah pada beberapa kecamatan yang telah ditargetkan, dinas pariwisata Kabupaten Barru mendapat nilai 0 dari skala 15, pengelola wisata Diana *Water Park* mendapat nilai 33 dari skala 15.

3. Strategi pendukung sumber daya

Strategi ini lebih berfokus pada bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya penting yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan organisasi. Sumber daya yang diberikan oleh organisasi ini termasuk:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memiliki peran ganda sebagai subjek dan objek dari aktivitas pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, apapun sistem canggih yang digunakan dalam pembangunan jika tidak ada sumber daya manusia, sistem tersebut tidak akan berhasil. Dari hasil penelitian terkait sumber daya manusia yang ada di *Diana Water Park* tenaga kepariwisataan yang melakukan penataan dan pemeliharaan wahana belum maksimal hal ini dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola wisata tersebut hanya berdasarkan pengalaman bukan bekal pendidikan dan pelatihan.

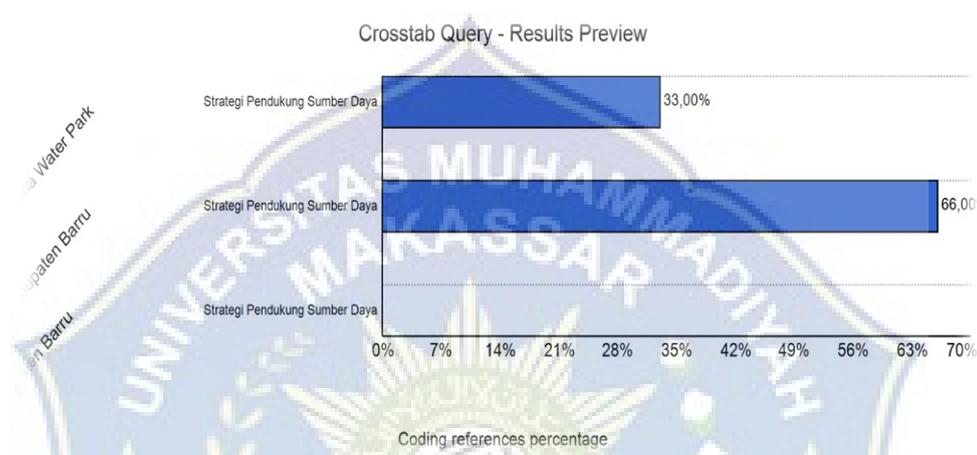
b. Sarana dan prasana

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan yang ada dan memudahkan pencapaian tujuannya. Sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai perlengkapan, peralatan kerja, dan fasilitas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang dijalankan organisasi untuk mencapai tujuannya atau perangkat yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah tetap melakukan sosialisasi untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat agar mereka mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam suatu organisasi, sosialisasi ini akan terus berjalan hampir setiap tahun walaupun realita yang terjadi di lapangan pajak daerah tidak bisa dijadikan

sebagai tolak ukur membiayai pembangunan, salah satu penyebabnya adalah rendahnya penerimaan pajak daerah yang diterima. Dalam penelitian ini untuk melihat strategi pendukung sumber daya dapat diolah melalui *software* Nvivo 12 *plus* sebagai berikut:

Grafik 4.4 Strategi Pendukung Sumber Daya



Sumber Data: Visualisasi Nvivo 2024

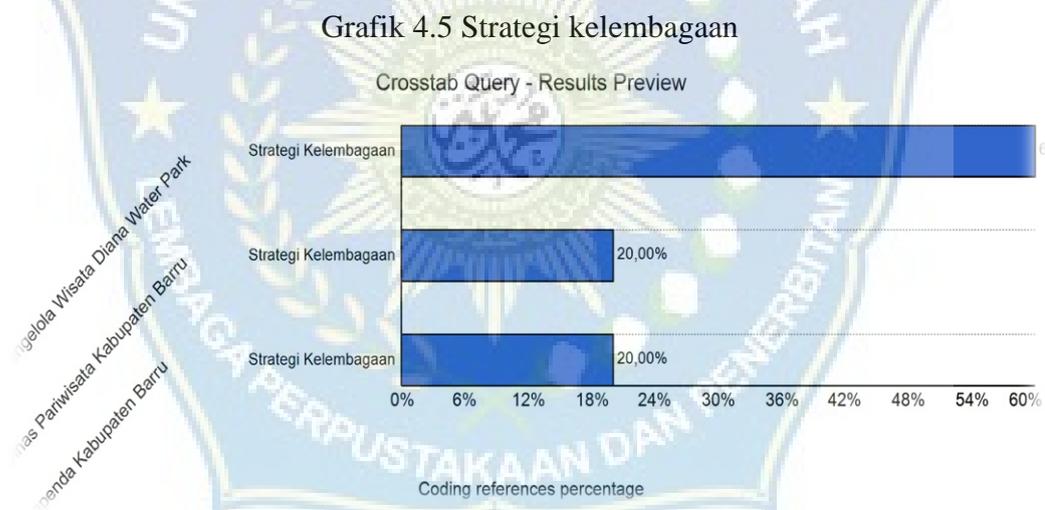
Hasil analisis data melalui *software* Nvivo 12 *plus* menunjukkan bahwa yang paling mendominasi dari hasil analisis tersebut yaitu dinas pariwisata Kabupaten Barru mendapat nilai 66 dari skala 15, keunggulan dinas pariwisata Kabupaten Barru mengadakan pelatihan dan pemilihan duta pariwisata setiap tahunnya. badan pendapatan daerah Kabupaten Barru mendapat nilai 0 dari skala 15, pengelola wisata Diana *Water Park* mendapat nilai 33 dari skala 15.

4. Strategi Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis merumuskan bahwa. Diana *Water Park* adalah milik Swasta bukan milik pemerintah, jadi bisa dikatakan SOP Diana *Water Park* dibuat oleh pemiliknya, pengelola wisata ini memberikan kontribusi besar untuk menarik banyak pengunjung salah satunya menambah spot foto yang

menarik di Diana Water Park, koordinasi pemerintah terhadap pengelola tetap berjalan meskipun wisata ini adalah milik swasta.

Evaluasi dan pemantauan terkait kinerja kelembagaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah juga selalu menghimbau kepada wajib pajak melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam penelitian ini untuk melihat strategi kelembagaan dapat diolah melalui *software* Nvivo 12 *plus* sebagai berikut:



Sumber Data: Visualisasi Nvivo 2024

Hasil analisis data melalui *software* Nvivo 12 *plus* menunjukkan bahwa yang paling mendominasi dari hasil analisis tersebut yaitu pengelola wisata Diana *Water Park* mendapat nilai 60 dari skala 15, pengelola Diana *Water Park* selalu membuat hal baru yang menarik banyak pengunjung termasuk menambah spot foto, badan pendapatan daerah Kabupaten Barru mendapat nilai 20 dari skala 15,

dan kebijakan fiskal terhadap daerah. Khusus pada kabupaten Barru pendapatan pada sektor pajak hiburan setiap tahunnya masih rendah hal ini karena pajak hiburan tidak memiliki potensi besar terhadap pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa strategi pemerintah daerah yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

strategi organisasi, dari strategi yang telah dijalankan pemerintah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Strategi program, berdasarkan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini badan pendapatan daerah melaksanakan sosialisasi tentang pajak ditingkat kecamatan.

Strategi pendukung sumber daya, dari strategi yang telah terlaksana pemerintah daerah Kabupaten Barru telah meningkatkan upaya promosi dan pemasaran untuk menarik lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi Diana Water Park, beberapa upaya yang telah dilakukan termasuk mengadakan promosi di media sosial.

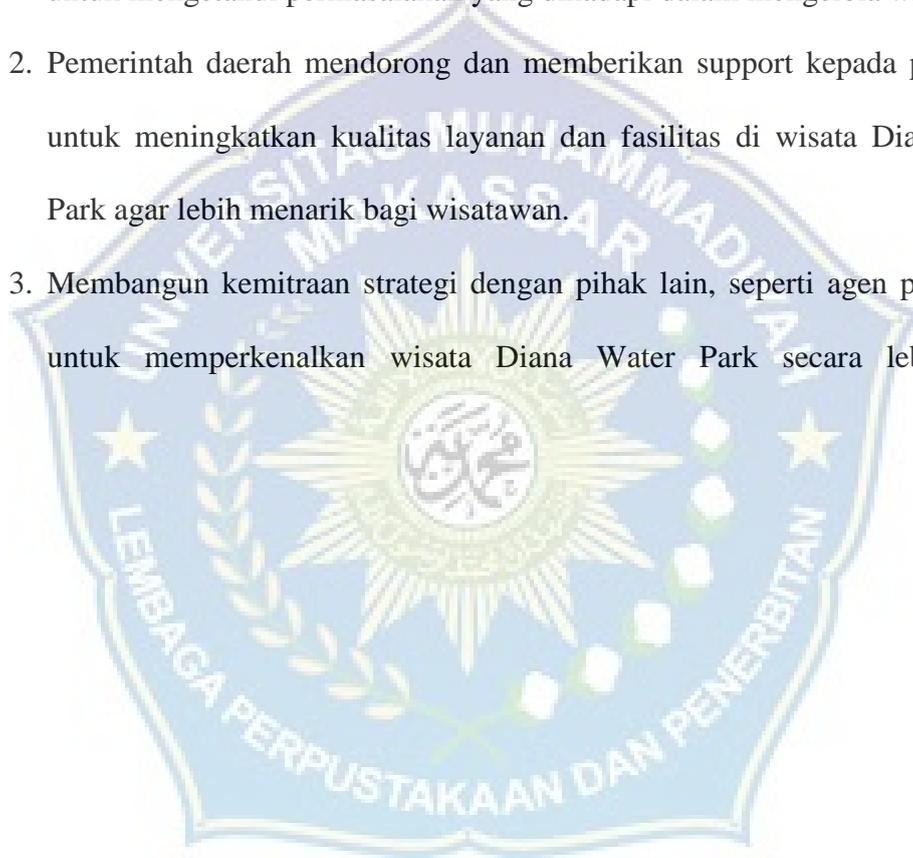
Rendahnya realisasi pendapatan asli daerah dapat menunjukkan beberapa masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah, salah satu faktor penyebab masalah ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, maka dari itu Kabupaten Barru harus lebih cepat mengoptimalkan strategi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Jika pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan rendah, maka pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada sumber pendapatan lainnya. Ketergantungan

berlebihan pada satu sumber dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan daerah jika sumber tersebut mengalami penurunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan pengelola Diana Water Park untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam mengelola wisata ini.
2. Pemerintah daerah mendorong dan memberikan support kepada pengelola untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas di wisata Diana water Park agar lebih menarik bagi wisatawan.
3. Membangun kemitraan strategi dengan pihak lain, seperti agen perjalanan untuk memperkenalkan wisata Diana Water Park secara lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A., Hudayah, S., & Fitriadi, F. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/1283>
- Ardiansyah, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli DAERAH. In *Jurnal Ekonomika* (Vol. 10, Issue 2). Universitas Borneo Tarakan. <https://doi.org/10.35334/jek.v10i2.767>
- Hadi, M. (2020). Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In *Jambura Economic Education Journal* (Vol. 2, Issue 2, pp. 59–69). Economic Faculty, Gorontalo State University. <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i2.5633>
- Hanifah, A. (2016). Strategi Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung). In *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS* (Vol. 1, Issue 1). Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. <https://doi.org/10.24967/jshs.v1i1.126>
- Lawati, S. (2018). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan* <https://www.ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/4>
- Mahmudah, H. (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 11, Issue 1, p. 72). Universitas Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.22219/jep.v11i1.3731>
- Multiningsih, P. S., Arenawati, A., & Yulianti R (2021). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2021) 9 (2) 291-302 <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/73>
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. In *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* (Vol. 2, Issue 2, pp. 151–172). Universitas Majalengka. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>

- Mustari, N., Hartaman, N., Sahrir, V. A., & Aulia, N. R. (2021). Branding Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Majene. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 282-293.
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & Sutrisno, B. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019). In *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)* (Vol. 1, Issue 1, p. 11). Universitas Padjadjaran. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33023>
- Refianto, R., & Christian, M. (2018). Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan ASLI DAERAH (Kajian Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di DKI Jakarta). *JMB: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jmb/article/view/1062>
- Rosmiati, R., Handayani, T., & Widodo, R. (2018). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. In *Jurnal Civic Hukum*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/76592066/pdf.pdf>
- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. In *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 18, Issue 1, pp. 76–83). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. In *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* (Vol. 9, Issue 4, p. 1338). Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Virnawati, M., Hakim, D. B., & A Faroby (2017). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi. In *Jurnal Manajemen, Strategi*. researchgate.net. <https://www.researchgate.net/profile/Faroby-Falatehan/publication/323173291>
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* (Vol. 8, Issue 3, pp. 333–338). Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>
- Zulfikar, I., & Rahman, A. (2019). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru. In *SENTRALISASI* (Vol. 8, Issue 1, p. 18). Universitas Muhammadiyah Sorong. <https://doi.org/10.33506/sl.v8i1.384>

- Zumardi, A. D., & Sanica, I. G. (2020). Strategi Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung (PAD) Dari E-Commerce (*Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/31408>)
- Bake, J., Yusuf, M., & Wahbi, A. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Di Kota Kendari. *Journal Publicuho*. <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/78>
- Wahyuni, S., & Yuliani, F. (2021). Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. *Journal of Social and Policy Issues*, 35–41. <https://doi.org/10.58835/jspi.v1i2.14>
- Boda, J., Mingkid, E., & Purwanto, A. (2022). Strategi Pemerintah Kota Manado Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Perhotelan. In *AGRI-SOSIOEKONOMI* (Vol.18, Issue 3, pp. 851–860). Universitas Sam Ratulangi. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.44725>
- Marlin, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 122. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.186>
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/16210>
- Bagaihing, M., Mantolas, C. M., & Nugraha, Y. E. (2022). Strategi Pengembangan Pantai Nimtuka Sebagai Potensi Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Bone, Kabupaten Kupang. *Tourism: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination, and MICE*, 5(2), 95-104.
- Yahya, F. E. (2022). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2020* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).

L

A

M

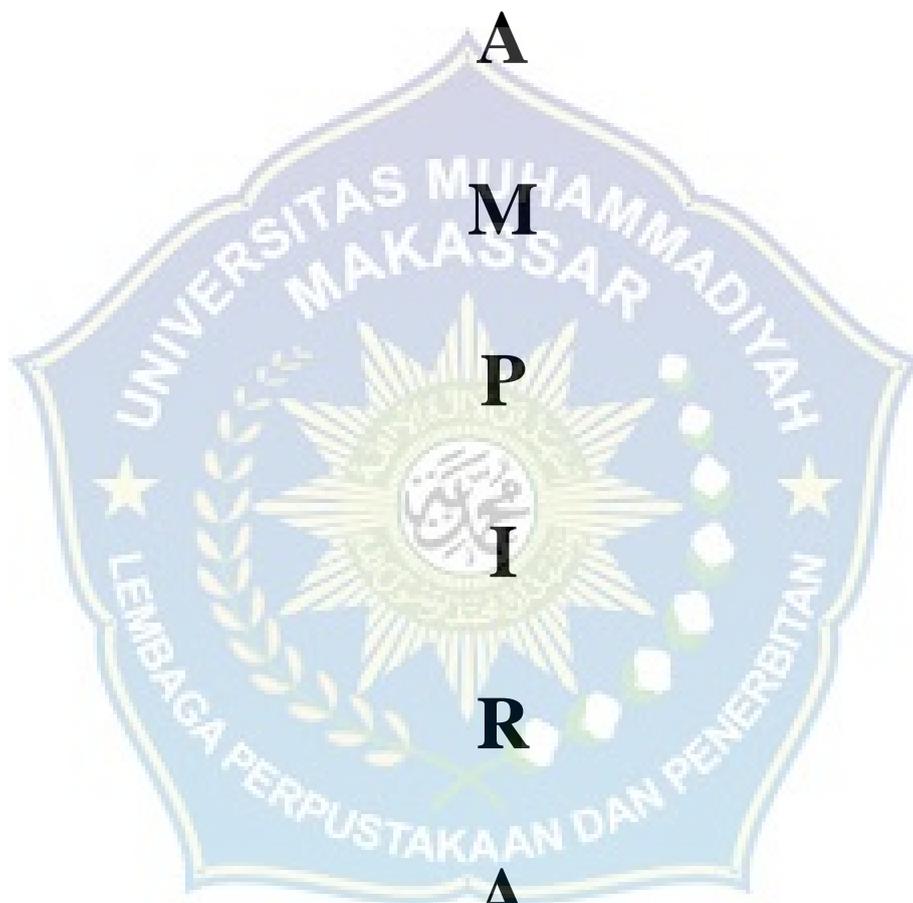
P

I

R

A

N







Wawancara dengan Bapak Abdul Rauf., S.E, M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Bapenda



Wawancara dengan Ibu St. Marwah Bakdur., S.A.P, selaku Staf subbid. Pembukaan dan Pelaporan Bapenda



Wawancara dengan Bapak Kurniadi., S.S, selaku Staf Pariwisata

Aplikasi monitoring
penerimaan daerah pada
sektor pajak
Hotel,Restoran,Hiburan &
Parkir



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Program ini disupervisi
langsung oleh korsupgah KPK
RI

Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat

v 1.0.7

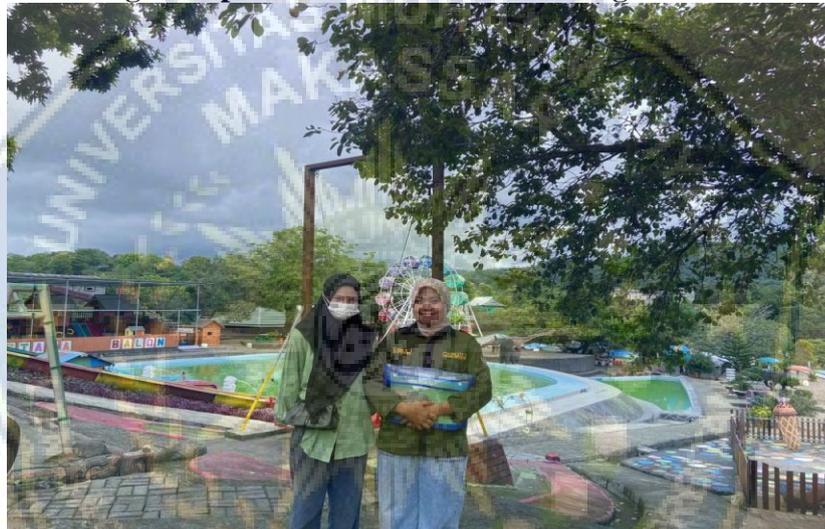
 Enter username

 Enter password

Sign In



Wawancara Dengan Bapak Sudarmanto Selaku Pengelola Diana Water Park



Wawancara Dengan Sulfiana Selaku Pengunjung Diana Water Park



Wawancara Dengan Linda Selaku Pengunjung Diana Water Park



Wawancara Dengan Ibu Iriani Selaku Pejabat Fungsional Dinas Pariwisata Kabupaten Barru



Wawancara Dengan Ibu Hj. Umi Selaku Pejabat Fungsional Dinas Pariwisata Kabupaten Barru



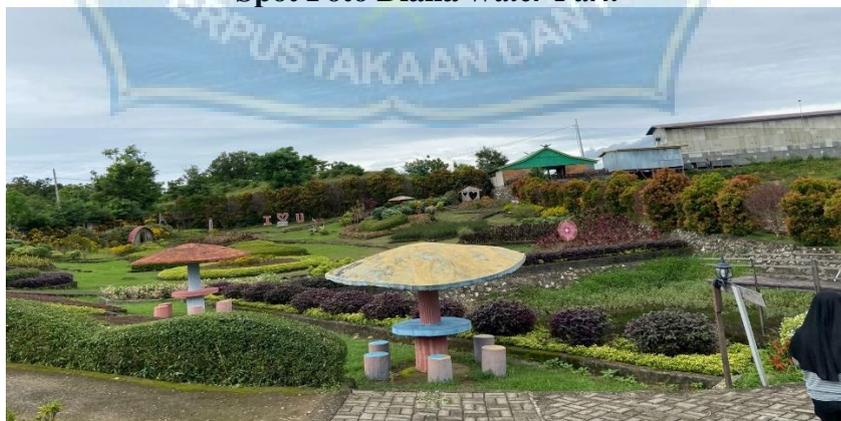
Kantor Disparpora Kabupaten Barru



Kantor Bapenda Kabupaten Barru



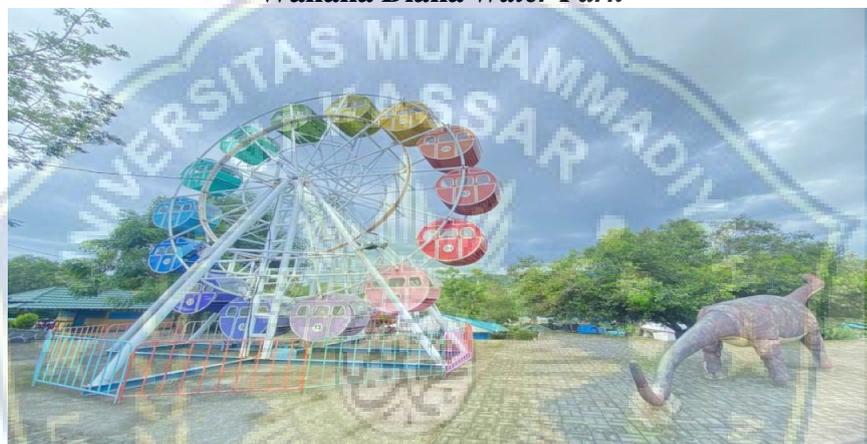
Spot Foto Diana Water Park



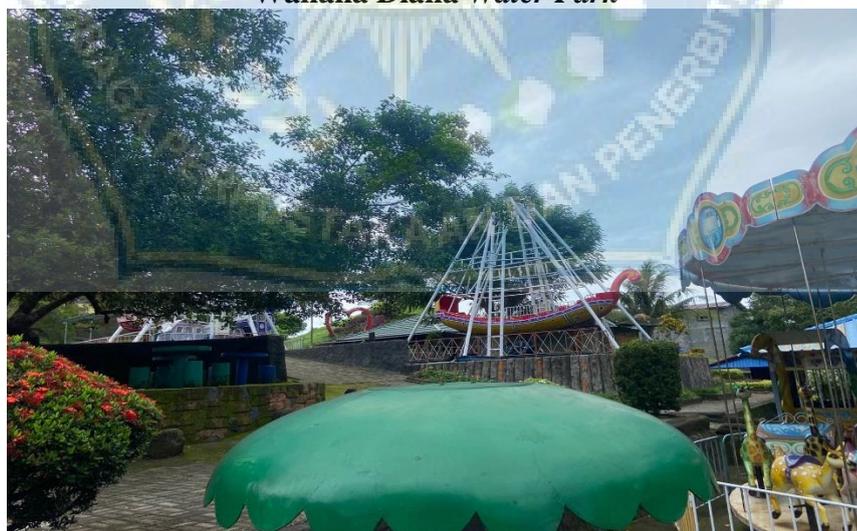
Taman Diana Water Park



Wahana Diana Water Park



Wahana Diana Water Park



Wahana Diana Water Park

Page 1

Data Pengunjung Diana Water Park 2021

Data Kunjungan Diana Water Park 2022

DATA KUNJUNGAN WISATA BUNDA WATA DIANA MANGRAGARA BERDASARKAN KUNJUNGAN KE-DIARYA-TAWISATA TAHUN 2023

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November/Desember	Jumlah
1. Kabupaten/Kota												
2. Kecamatan												
3. Desa/Tamuk Wisata												
4. Bukit Madido	1	-	-	2	-	-	3	18	36	26	-	90
5. Pulau Duhungan	-	-	-	-	-	-	2	-	-	18	23	43
6. Kampung Nelayan Murno	-	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	12
7. Pantai Ujung Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	37
8. Museum Arung Tuwong	-	-	-	-	-	9	8	15	18	54	95	199
9. Peltakan Ecological	1	2	0	2	0	0	-	-	-	-	-	5
10. Jumlah												

Data Kunjungan Diana Water Park 2023



Publish or Perish

VOSviewer Online

Visualizing scientific landscapes



Aplikasi Olah Data



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fsiip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fisiip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2306/FSP/A.5-VI/VIII/1445/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Al-Fina. S
Stambuk : 105641110220
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hiburan di Pulau Dutungan Kabupaten Barru"

Pembimbing I : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Pembimbing II : Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM-730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
Public Administration - Government Studies - Communication Science



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. Iskandar Unru Telp.(0427)21662, Fax(0427)21410
<http://dpmptspk.barrukab.go.id>; e-mail: barrudpmptspk@gmail.com. Kode Pos 90711

Barru, 16 Januari 2024

Kepada

Yth. 1. Kepala Bapenda
 2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Nomor : 018/IP/DPMPSTP/I/2024
 Lampiran :-
 Perihal : Izin Penelitian

di -
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 575/S.01/PTSP/2024 perihal tersebut diatas, maka **Mahasiswi** dibawah ini:

Nama : ALFINA. S
 Nomor Pokok : 105641110220
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
 Alamat : DUSUN MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **16 Januari 2024 s/d 11 Maret 2024**, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PAJAK HIBURAN DI DIANA WATER PARK KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja)/Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja)/Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19770829 199612 1 001



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
4. Mahasiswi yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Al - Fina. S

Nim : 105641110220

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



L. Nur Hafid, S.Hum, M.I.P
NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Al - Fina. S lahir di Barru pada tanggal 03 Maret 2001, merupakan anak ke lima dari enam bersaudara buah hati dari Ibu I Jume dan Ayah Syainuddin (Almarhum). Penulis menempuh Pendidikan pertama di SD Inpres Matajang dan selesai pada tahun 2014, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 Tanete Rilau dan selesai pada tahun 2017, pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di MA Muhammadiyah Padaelo dan selesai pada tahun 2020. Berkat dukungan dari orang tua disertai dengan doa, pada tahun 2020 penulis berhasil lulus masuk Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menempuh ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hiburan Di Diana *Water Park* Kabupaten Barru.